

**AGENDA SETTING PEMBERITAAN KONFLIK REKLAMASI TELUK JAKARTA  
OLEH MEDIA DARING ANTARA NEWS DAN REPUBLIKA ONLINE TAHUN 2017  
(TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL)**

**AGENDA SETTING ON THE NEWS ABOUT THE JAKARTA BAY RECLAMATION  
FROM ONLINE MEDIA ANTARA NEWS AND REPUBLIKA ONLINE IN 2017  
(OVERVIEW FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE)**

Fajria Hasta Rizqi <sup>1</sup>, M. Adnan Madjid <sup>2</sup>, A. Setyo Wibowo <sup>3</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan  
(fajriahasta@gmail.com)

**Abstrak** -- Pada tahun 2017, Provinsi DKI Jakarta berada pada tahun politik dengan adanya Pemilu yang menyebabkan polemik atas fenomena reklamasi Teluk Jakarta tereskalasi. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran media dalam menggiring opini publik dan juga kebijakan pemerintah terhadap fenomena tersebut. Revolusi Industri 4.0 juga menyebabkan media mulai beralih dari cetak menjadi media daring berupa *website* portal berita yang dapat diakses dengan mudah dan bersifat *real-time*. ANTARA News dan *Republika Online* merupakan media daring yang dipilih sebagai objek dikarenakan kedua media tersebut memiliki sikap yang berbeda dalam menyikapi fenomena reklamasi Teluk Jakarta. Observasi teks berita dilakukan pada waktu *traffic* pemberitaan tertinggi di tahun 2017, kemudian dengan wawancara dengan narasumber terkait serta studi dokumen. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis isi, serta menggunakan triangulasi teknik. Analisis menggunakan 2 (dua) teori utama yakni *Agenda Setting* serta Konsep Sekuritisasi dan didukung beberapa teori tambahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa media daring portal berita yang diteliti memiliki perbedaan *Agenda Setting* yang menyebabkan adanya perbedaan warna berita yang dikeluarkan di tahun 2017. Pemberitaan tersebut berdampak pada keamanan nasional Indonesia yakni pada sektor penggolongan ancaman, selain itu juga memberikan rekomendasi bagi kedua media daring untuk memperhatikan kaidah keamanan nasional agar pemberitaan yang dikeluarkan mampu mendukung stabilitas keamanan nasional.

**Kata Kunci:** reklamasi teluk jakarta, pemberitaan, media daring, keamanan nasional

**Abstract** -- In 2017, DKI Jakarta Province had been on its political year due to the Governor Election which was escalating the polemics on Jakarta Bay reclamation. Those issues were inseparable from the role of media which lead public opinions and also the government policies about the phenomenon. Industrial revolution 4.0 makes media changes its platform from printing to website of news portal which gives easy access to the news and also provides real-time information. ANTARA News and *Republika Online* were selected as object of the research for their different positions on reporting

---

<sup>1</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Universitas Pertahanan.

*Jakarta Bay reclamation. This research was conducted by observing the online news at the highest news traffic time in 2017, then by conducting interviews with persons who are related to the issue and also do the document studies. The method used in this reasearch is qualitative with a case study approach and content analysis, as well as using technical triangulation. The analysis uses 2 (two) main theories, Agenda Setting and Concept of Securitization and supported by several additional theories. The results of the research stated that the online media news portal studied had a different Agenda Setting which caused a difference in the nuance of the news issued in 2017. The news had an impact on Indonesia's national security, to classify the different threats to national security. Also this research provides recommendations for both online media to pay attention to the rules so that the news released could support national security stability.*

**Keywords:** *jakarta bay reclamation, news report, online media, national security*

## Pendahuluan

Perdebatan mengenai reklamasi Teluk Jakarta diawali pada tahun 2015 ketika pengerjaan mega proyek tersebut dimulai. Terdapat banyak kendala salah satunya dikarenakan adanya gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) dan juga penghentian sementara atau disebut juga moratorium dari Kemenkomaritim pada tahun 2016 dibawah kepemimpinan Rizal Ramli dan juga moratorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kementerian terkait lainnya karena dampak yang besar terhadap lingkungan.<sup>4</sup>

Perdebatan yang ada dapat disebut sebagai sebuah polemik. Polemik adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media

massa.<sup>5</sup> Polemik reklamasi yang terjadi semakin meningkat ketika pada tahun 2017 ada sebuah momentum besar bagi DKI Jakarta yakni terselenggaranya Pemilu pada DKI Jakarta tahun 2017.<sup>6</sup>

Polemik reklamasi yang terjadi selama tahun 2017 tidak lagi hanya sebuah perbedaan dalam pemikiran di masyarakat mengenai pro atau kontra terhadap reklamasi. Polemik telah memiliki bentuk-bentuk manifestasi seperti adanya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berdampak secara langsung, seperti nelayan dan koalisi-koalisinya ataupun yang tidak berdampak langsung seperti mahasiswa.

Menurut Jan–Felix Schrape, *website* informasi bagi media digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni *micro media* berupa *chat room* dan komunikasi dua arah lainnya,

---

<sup>4</sup> Biro Informasi dan Hukum Kemenkomaritim Republik Indonesia, 2016, *Rizal Ramli pastikan Moratorium Reklamasi*, melalui <https://maritim.go.id/rizal-ramli-pastikan-moratorium-proyek-reklamasi/> pada Desember 2018.

<sup>5</sup> Arti polemik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/polemik>

<sup>6</sup> Pemilu dilaksanakan 2 (dua) putaran, yakni pada Februari dan April 2017.

*meso media* yakni sosial media berplatform *website* seperti *microblogging*, *facebook*, dan lainnya, serta *mass media* seperti *website* portal berita.<sup>7</sup> Media massa merupakan media yang bersifat *one-to-many* yakni terdapat satu organisasi yang berisi jurnalis profesional yang memberikan informasi melalui pemberitaan, sementara media sosial bersifat *many-to-many* yakni dari siapa saja dapat memberikan informasi kepada khalayak luas.<sup>8</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai media massa berupa portal berita yang mana dapat dengan mudah diakses masyarakat dan memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan pemberitaan. *ANTARA News* dan *Republika Online* dipilih karena dengan mengetikkan *keyword* Reklamasi Teluk Jakarta di kedua media, terlihat *tone* serta redaksi yang berbeda pada hasil pencarian berita yang muncul di tahun 2017.

Kemampuan media menggiring opini publik hingga menyebabkan adanya polemik, menyebabkan tinjauan dari keamanan nasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan agar media bisa berperan untuk tidak

mengeskalasi polemik yang ada. Maka dari itu, dalam penelitian ini, *ANTARA News* dan *Republika Online* akan dianalisis mengenai pemberitaannya melalui proses *agenda setting* dan juga rekomendasi bagi media tersebut untuk pemberitaan kedepannya agar sesuai dengan kaidah media yang baik berdasarkan perspektif keamanan nasional.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran dari suatu fenomena secara jelas dan apa adanya. Proses analisis datanya bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan.<sup>9</sup> Pendekatan dalam penelitian ini merupakan studi kasus sekaligus analisis isi, yakni menetapkan suatu isu/fenomena tertentu kemudian dikaji lebih dalam serta menggunakan teks pemberitaan untuk memperkuat data akan isu/fenomena yang dikaji.

Lokus terbagi menjadi lokus maya dan lokus fisik. Lokus maya antara lain adalah *website* *ANTARA News* yakni *antaranews.com* dan juga *website* *Republika Online* yakni *republika.co.id*.

---

<sup>7</sup> Jan-Felix Schrape, 2016, *Social Media, Mass Media and the 'Public Sphere': Differentiation, Complementarity and Co-existence*, Stuttgart: University of Stuttgart, hlm. 10

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> John W. Creswell, 2003, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", Second Edition, University of Nebraska, Lincoln : SAGE Publications, hlm. 205

Lokus fisik terletak di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Direktorat Informasi Kementerian Komunikasi, Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta, Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Dirjen PPKL KLHK, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kantor Berita Antara di bidang ANTARA News serta Kantor Republika di bidang *Republika Online* (ROL). Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling* yakni menentukan informan penelitian berdasarkan kriteria yang sesuai dengan penelitian.<sup>10</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi teks berita, wawancara terhadap subjek penelitian, dan studi dokumen. Pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi data, yakni dilakukan dengan melakukan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana yakni setelah pengumpulan data, maka dilakukan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>11</sup> Analisis isi juga dilakukan terhadap konten berita ANTARA News dan *Republika Online* untuk mengetahui tone

*pemberitaan* serta membuktikan *agenda setting* pada pemberitaan bulan Oktober 2017 yakni bulan dengan *traffic* pemberitaan tertinggi di tahun 2017 bagi kedua media daring.

2 *Ground Theory* digunakan, yang pertama yakni *Agenda Setting* menurut James Dearing dan Everett Rogers (1996) dan Konsep Sekuritisasi yang dicetuskan Barry Buzan dan Ole Waever (1995). Teori dan konsep tersebut dalam penggunaannya juga dibantu oleh 3 (tiga) teori yaitu *Agenda Setting* didukung oleh *War and Peace Journalism* (Johan Galtung) serta *Green Theory* (Eckersley), sementara Konsep Sekuritisasi diperkuat oleh Dialektika (Hegel).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### ***Agenda Setting* ANTARA News dan *Republika Online* pada Tahun 2017**

*Agenda Setting* digunakan sebagai salah satu *grand concept* dalam penelitian ini. Pengertian dari *agenda setting* adalah kompetisi yang berlangsung di antara pemrakarsa isu untuk mendapatkan perhatian dari profesional media, publik

---

<sup>10</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-17, Bandung: Alfabeta, hlm 117

<sup>11</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Saldana J., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Arizona State University

serta kelompok elite kebijakan.<sup>12</sup> *Agenda Setting* menjelaskan bahwa media melakukan *framing* atau fokus terhadap suatu isu yang dipilih dan bukan isu lainnya untuk membentuk opini publik melalui isu yang diangkat. Hal ini sebenarnya dijelaskan sebelumnya oleh Walter Lippmann bahwa ada sebuah gambar dalam pemikiran manusia yang memang ingin dibentuk atas hal-hal yang tidak mampu untuk mereka ketahui atau mereka jangkau, dan apabila gambar-gambar tersebut ditindaklanjuti oleh kelompok atau individu atas nama kelompok maka hal tersebut dinamakan Opini Publik.<sup>13</sup>

*Agenda Setting* dapat dilihat juga melalui *editorial policy*. *Editorial policy* ANTARA News dirancang oleh Dewan Redaksi yang merupakan *central desk* dengan susunan yang terdiri dari 1 (satu) Pemimpin Redaksi dan 4 (empat) Redaktur Pelaksana. *Central desk* berkuasa penuh atas penentuan kebijakan tersebut. Walaupun di atas Pemimpin Redaksi terdapat posisi Direktur, namun sepenuhnya kebijakan tersebut terpusat pada *central desk*. *Editorial policy* juga harus disusun sesuai dengan visi dan misi

dari ANTARA News yang dirangkum dalam 3E+1N yakni *Educating, Enlightening, Empowering*, dan Nasionalisme. ANTARA News berupaya mengelola opini dari berbagai kalangan dengan menimbang aspek 3E+1N tersebut. Pihak ANTARA News mengatakan berita-berita dari opini pihak-pihak yang ingin merusak suasana atau merusak demokrasi tidak akan diberitakan.

*Editorial policy* ANTARA News tidak memberikan *framing* tertentu atau khusus dalam pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta. Ada banyak sekali pihak yang berperan dalam konflik tersebut, sehingga ANTARA News mencoba lebih berimbang dalam memberitakan. Pihak yang disorot dalam pemberitaan. Posisi ANTARA News lebih pada posisi mencerahkan dibanding menolak atau mendukung.

Pada tahun 2017, *agenda setting* ANTARA News adalah Pemilukada DKI Jakarta karena memiliki magnitudo yang sangat besar. Hal tersebut menyebabkan konflik reklamasi Teluk Jakarta hanya menjadi *sub issue* dari Pemilukada DKI Jakarta 2017. Walaupun merupakan *sub issue* namun konflik reklamasi Teluk

---

<sup>12</sup> James W. Dearing dan Everett M. Rogers, 1996, *Communication Concepts 6: Agenda-Setting*, California: Sage Publications, Inc, hlm. 1-2

<sup>13</sup> Walter Lippmann, 1998, *Public Opinion* (Cetakan Kedua), New Jersey: The Macmillan Company, hlm. 29.

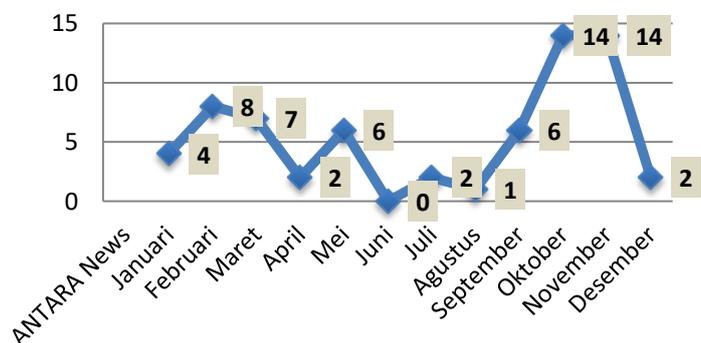
Jakarta tetap disorot karena konflik tersebut erat kaitannya dengan politik pemilu. Sehingga prioritas dan porsi utama pemberitaan ANTARA News di tahun 2017 adalah seputar Pemilukada dan dinamika politik ibukota, bukan reklamasi Teluk Jakarta.

Pemberitaan ANTARA News dikontrol secara kuantitas. Apabila terdapat 5 (lima) berita mengenai petahana, maka harus ada kurang lebih 5 (lima) berita juga yang memberitakan mengenai oposisi. Proses kontrol kuantifikasi ini lebih sering dilakukan paling cepat setiap 1 (satu) minggu atau kurun waktu yang ditentukan. Sehingga diharapkan masyarakat dapat melihat keberimbangan (*fairness*) dari ANTARA News yang dikatakan Teguh masih berada di posisi tengah dalam pandangan masyarakat. Kuantifikasi berita juga dilakukan terhadap berbagai pemberitaan, salah satunya yakni pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta.

ANTARA News mengeluarkan 66 (enam puluh enam) berita mengenai Reklamasi Teluk Jakarta pada tahun 2017. Jumlah yang tidak terlalu banyak dalam memberitakan suatu isu besar dikarenakan fokus dari ANTARA News bukanlah mengenai reklamasi Teluk Jakarta melainkan lebih berfokus pada

Pemilukada DKI Jakarta 2017. Reklamasi dianggap sebagai salah satu *sub issues* atau isu-isu yang merupakan turunan dari persoalan Pilkada DKI Jakarta yang keberadaannya dapat memberikan pengaruh terhadap kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Jumlah pemberitaan mengenai reklamasi Teluk Jakarta cukup fluktuatif

**Bagan 1.** Jumlah Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta dari ANTARA News Tahun 2017



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

*Editorial policy* dari *Republika Online* merupakan kebijakan editorial yang berpihak pada masyarakat, khususnya umat Islam sebagai pembaca mayoritas *Republika Online*. Berpihak pada masyarakat yang dimaksud adalah dengan menyajikan berita-berita bermanfaat bagi pembaca. *Republika Online* bukan lagi mencari pembaca ataupun *click viewer* dengan berita-berita yang tidak penting.

*Editorial Policy* disusun oleh Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana dan Asisten Redaktur Pelaksana. Proses penyusunannya dilaksanakan pada rapat

internal dengan melihat dari seluruh sudut pandang, kemudian kebijakan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi pekerja lapangan (seperti reporter) agar selalu tetap dalam koridor tujuan pemberitaan *Republika Online* dan tidak terbawa arus pernyataan narasumber yang memiliki kepentingan. Sehingga pekerja lapangan mampu meluruskan informasi ketika melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki kecenderungan.

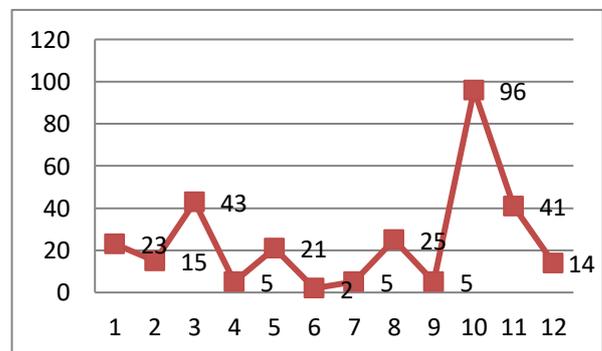
Pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta diawali dengan kebijakan editorial untuk mendudukkan reklamasi dari tujuan awalnya. Daerah reklamasi yang tujuan awalnya belum tercapai dan malah bergeser menjadi pembangunan kawasan elit membuat *Republika Online* peduli atas ketidakadilan tersebut dan mengawal reklamasi melalui pemberitaan agar ketika tidak bisa lagi ditolak untuk dibangun maka pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dapat sesuai dengan tujuan awalnya.

Berlandaskan kegiatan mengawal reklamasi, maka prioritas pemberitaan *Republika Online* dalam agenda setting-nya adalah reklamasi Teluk Jakarta dan menjadi *main issue* yang berkembang menjadi *hot issue* di tahun 2017. Bayu hermawan juga mengatakan bahwa isu

tersebut masih *running* di tahun 2018. Sehingga pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta pada *Republika Online* merupakan *main topics* dan selalu dikawal prosesnya melalui pemberitaan yang masif (secara kuantitas).

*Republika Online* mengeluarkan 295 (dua ratus sembilan puluh tujuh) berita mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Hal tersebut dikarenakan reklamasi merupakan fokus utama dari *Republika Online* yang mana tujuan memberitakan reklamasi adalah untuk menegaskan tujuan reklamasi dan peruntukannya. Posisi *Republika Online* adalah mengawal proses reklamasi agar tidak merugikan masyarakat.

**Bagan 2.** Jumlah Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta dari *Republika Online* Tahun 2017



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

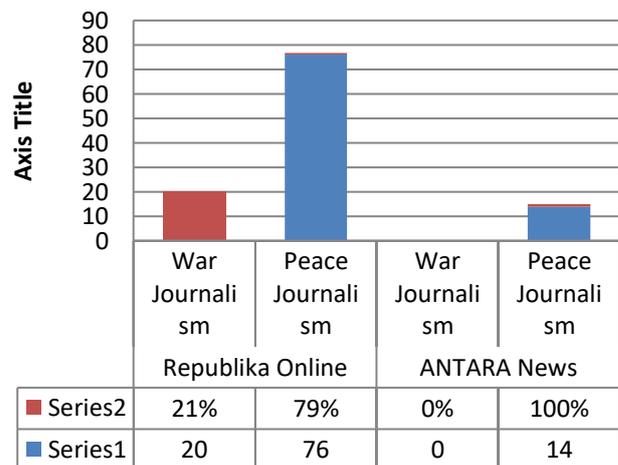
*Editorial policy* sangat berpengaruh kepada tindakan media dalam melakukan pemberitaan begitupula dengan kecenderungannya dalam memberitakan, baik ANTARA News maupun *Republika*

Online memiliki kecenderungan masing - masing. Penelitian ini menguji kecenderungan kedua media online *portal* berita tersebut melalui 2 (dua) aspek yakni aspek jurnalisme damai atau jurnalisme perang (*war and peace journalism*) serta melalui *Green Theory* yang dapat merumuskan sebuah berita cenderung mengarah pada kebutuhan lingkungan ataukah pada kebutuhan manusia melalui pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017.

Aspek pemberitaan dapat dilihat melalui sisi jurnalisme damai atau perang. *War and Peace Journalism* atau jurnalisme damai merupakan teori yang dicetuskan Johan Galtung.<sup>14</sup> Berita tergolong *peace* (damai) apabila berorientasi pada damai dengan memaparkan formasi konflik yakni melingkupi semua pihak dalam konflik, baik dari elite (pemerintah dan pengembang) maupun dari pihak yang tidak mampu bersuara (dalam kasus reklamasi antara lain adalah nelayan dan lingkungan), berusaha mencapai tujuan bersama (*win win solution*) serta memaparkan isu yang sebenarnya atau transparansi terhadap fenomena, bersifat proaktif, orientasi terhadap yang

termarjinalkan, serta solutif terhadap permasalahan. Sementara yang termasuk *war* adalah berita yang reaktif, *zero-sum* atau kemenangan salah satu pihak saja.

**Bagan 3.** Perbandingan War and Peace Journalism antara ANTARA News dan Republika Online dalam Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Oktober 2017



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Pemberitaan ANTARA News yang berjumlah 14 (empat belas) secara keseluruhan mengarah pada jurnalisme damai atau *peace* dan telah menunjukkan bahwa memang ANTARA News berpegang pada nasionalisme yang tidak ingin membuat pembaca tercerai berai. Pemberitaan di ANTARA News didominasi oleh sikap yang berusaha netral dalam memberitakan konflik Reklamasi Teluk Jakarta, serta masih memegang kaidah-kaidah *peace journalism*. Disisi lain, *Republika Online* juga memiliki nilai yang

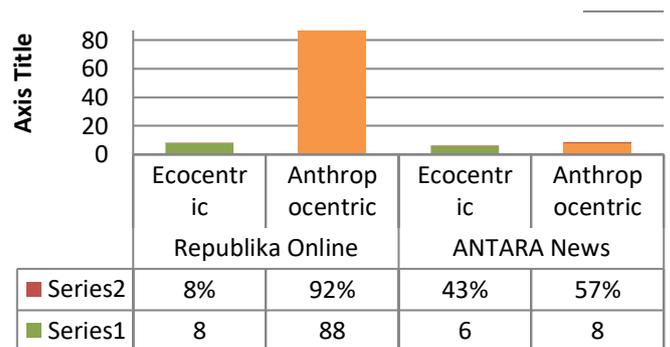
<sup>14</sup> Webel, Charles dan Galtung, Johan, 2007, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, New York: Routledge, hlm. 248.

cukup bagus yakni lebih banyak pemberitaan yang bersifat *peace journalism* dibanding dengan *war journalism*. Analisis ini hanya berdasar pada bulan Oktober 2017 yang mana kebijakan pemberitaan memang sangat diharapkan untuk mengawal proses reklamasi ketika ada pergantian Gubernur di DKI Jakarta. Kesimpulannya, kedua media sudah baik dalam menerapkan kaidah *peace journalism* karena berusaha menghadirkan informasi secara holistik dan *cover both sides* atas pihak-pihak pendukung dan penolak reklamasi.

Penelitian ini menggunakan *Green Theory* dari Robyn Eckersley. Eckersley mengatakan bahwa *anthropocentric* memiliki perhatian terhadap penyebab-penyebab sosial serta distribusi sumberdaya antara kelompok kaya dan miskin (perspektif ekonomi), sementara *ecocentric* melihat kelestarian lingkungan sebagai sesuatu yang vital yang sangat berguna untuk kehidupan manusia (perspektif ekologi)<sup>15</sup> Aspek *ecocentric* yakni mengedepankan hajat hidup lingkungan semisal kerusakan lingkungan, apa yang dibutuhkan lingkungan agar tetap lestari, serta dampak-dampak

lingkungan yang akan terjadi apabila manusia melakukan suatu tindakan masuk dalam pemberitaan, sementara *anthropocentric* lebih pada hajat hidup manusia seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan ruang, dan lain sebagainya.

**Bagan 4.** Perbandingan *Ecocentric* dan *Anthropocentric*



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Pemberitaan keduanya mengenai reklamasi di bulan Oktober 2017 masih didominasi oleh pemberitaan yang berfokus pada kepentingan manusia, seperti persoalan ekonomi reklamasi hingga kasus korupsi. Persoalan mengenai lingkungan masih belum menjadi perhatian utama, namun ketimpangan *Republika Online* jauh lebih besar dibandingkan dengan *ANTARA News* yang masih cukup berimbang. Hal tersebut dikarenakan faktor banyaknya pemberitaan di *Republika Online* sehingga

<sup>15</sup> Robyn Eckersley, 1992, *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*, New York: UCL Press, hlm. 29.

mungkin mempersulit kontrol terhadap berita.

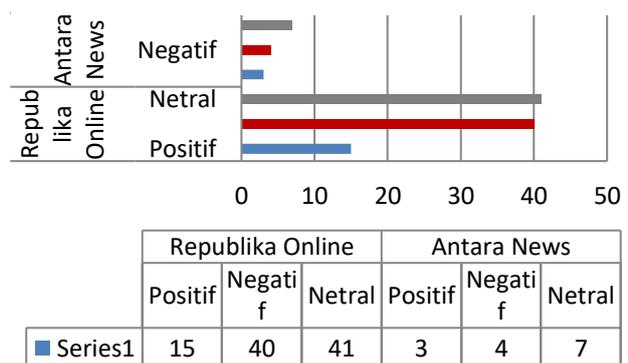
Polemik antara pro dan kontra reklamasi terjadi di publik, baik di perdebatan formal maupun informal. Polemik yang berkelanjutan tersebut tidak menemukan titik terang dikarenakan banyaknya diskursus yang diberikan elite maupun media dalam membentuk opini masyarakat. Sebagai negara dengan tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap media sebanyak 67%<sup>16</sup>, maka media di Indonesia merupakan salah satu unsur kuat yang mampu mengarahkan kemana arah diskursus akan berjalan di masyarakat.

Kedua media sebenarnya memiliki sasaran yang sama yakni menginginkan informasi dan gambaran mengenai reklamasi dapat secara jelas dan detail dikonsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat mampu bertahan walau kuatnya polemik yang terjadi, apalagi ada tunggangan kepentingan politik yang memperkeruh arus informasi mengenai reklamasi, serta terbentuk masyarakat yang memiliki *standing point* tertentu dalam reklamasi. Walau sebenarnya, media memiliki *order* atau keinginan

pelanggan untuk mendapatkan informasi seperti apa.

Pembentukan sasaran opini publik juga tidak terlepas dari *media agenda*, dari *editorial policy* dan maksud dari menaikkan berita. *Tone* pemberitaan merupakan sarana yang terlihat bagi pembentukan opini publik.

**Bagan 5.** Perbandingan *Tone* Pemberitaan



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Apabila dilihat melalui *tone* pemberitaan mengenai reklamasi, maka terlihat opini apa yang ingin dibentuk. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kedua media didominasi oleh pemberitaan yang netral, namun apabila dibandingkan dengan pemberitaan yang lain, maka muncul ketimpangan yang cukup besar dari *Republika Online*. Walau netral masih mendominasi nuansa pemberitaan, namun pemberitaan bernada negatif juga masih banyak secara kuantitas dan hanya

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil penelitian dari *Edelman Trust Barometer* yakni Indonesia masuk dalam 5 (lima) negara yang tingkat kepercayaan terhadap media tinggi yakni 67%, data tersebut merupakan

kepercayaan terhadap media online dan sampel berupa masyarakat terinformasi (*public informed*). Data *Edelman Trust Barometer: 2017 Executive Summary*, hlm. 2-4.

berselisih 1 (satu) berita dengan berita netral.

Disisi lain ANTARA News mencoba cukup berimbang. Hal ini kembali lagi pada *policy* dari ANTARA News yakni mengkuantifikasi pemberitaan agar dalam kurun waktu tertentu, pemberitaan dapat selalu berimbang. Berimbang yang dimaksud adalah pemberitaan yang netral ataupun seimbang antara positif dan negatif. Pada bulan Oktober 2017, proses kuantifikasi termasuk berhasil dikarenakan perbandingan yang tidak terlalu berat sebelah dan cenderung netral.

Kesimpulannya adalah bahwa opini yang ingin dibangun media terhadap masyarakat salah satunya terlihat melalui *tone* pemberitaan, walau pada awal tujuan kedua media sama yakni mencerahkan masyarakat, namun cukup terlihat ada keberpihakan pada salah satu media.

Pemberitaan sangat berpengaruh terhadap regulasi atau kebijakan yang akan ataupun telah dikeluarkan pemerintah. Menurut Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemberitaan merupakan salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam Rapat Pimpinan ataupun Rapat Pimpinan Terbatas di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Porsi keberpengaruhan media dengan

regulasi dipengaruhi oleh media *online*, cetak dan juga televisi. Media *online* digunakan sebagai pencarian *trending issue*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengatakan bahwa media merupakan unsur yang penting dalam mengawasi dan mengawal regulasi maupun mendesak pemerintah untuk menerbitkan sebuah regulasi karena media memiliki fungsi sebagai *watch dog* (anjing penjaga).

Hal senada juga disampaikan oleh *Republika Online*, bahwa media merupakan anjing penjaga, yakni ketika ada suatu peristiwa, media akan memberikan sorotan-sorotan pada hal kritis sehingga pemerintah mampu bertindak dengan bijak, selain itu media juga memiliki peran untuk mengawasi agar suatu isu tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan lain selain mensejahterakan masyarakat. *Republika Online* juga menjelaskan ketika ada sesuatu yang di *blow up* oleh media dan pemerintah tidak melakukan apapun yakni tetap pada posisinya maka hal tersebut akan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

ANTARA News melalui pemberitaannya juga melakukan kritik terhadap pemerintah, walaupun *stakeholder* media tersebut merupakan

pemerintah. Tujuan ANTARA News melakukan hal tersebut adalah menjunjung demokrasi. Teguh Priyanto mengatakan bahwa bagaimanapun ANTARA News adalah media yang juga melakukan *check and balance* terhadap pemerintah atas regulasi atau tindakan pemerintah.

Begitupula kebijakan akhir reklamasi juga didapatkan melalui gagasan narasumber pemberitaan media di tahun 2017 yang kemudian diimplementasikan pada tahun 2018 yang lebih lanjut akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

Pada intinya media lebih dahulu dari kebijakan atau kebijakan lebih dahulu dari media merupakan sebuah sudut pandang yang sama-sama memiliki kebenaran, dikarenakan pemerintah yang demokratis sehingga eksistensi media dalam mengawal suatu fenomena dan kebijakan masih diperhatikan pemerintah.

### **Perspektif Keamanan Nasional**

Keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis dan dibutuhkan kestabilannya sebagai prakondisi bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna

mewujudkan tujuan nasional yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dalam negeri yakni pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, interaksi masyarakat dan dinamika politik.<sup>17</sup> Keamanan nasional merupakan aspek yang sangat penting dan krusial bagi kehidupan bangsa dan negara dikarenakan keamanan nasional merupakan sebuah perspektif baru yang melihat fenomena secara menyeluruh dan melihat ancaman secara lebih komprehensif. Analisis perspektif keamanan nasional dibagi menjadi 2 (dua) yakni mengenai sekuritisasi atau pembentukan ancaman dari fenomena reklamasi dan dialektika Hegel dalam melihat media dalam memberitakan konflik reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017.

Waever menyatakan bahwa konsep sekuritisasi didasari bahwa penetapan ancaman berasal dari konstruksi diskursif.<sup>18</sup> Sekuritisasi merupakan proses menentukan ancaman yang dikonstruksi secara sosial (*socially constructed*). Peran media massa yang mampu melakukan penggirinan opini atau memberikan gambaran bagi pembacanya, seharusnya

---

<sup>17</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, hlm. 27.

<sup>18</sup> Paul D. Williams, 2008, *Security Studies: An Introduction*, New York: Routledge.

mampu dimanfaatkan sebagai unsur peningkatan dan penjaga stabilitas keamanan nasional. Kasus konflik reklamasi memberikan banyak hal mengenai polemik reklamasi yang membuat masyarakat kebingungan untuk menentukan potensi ancaman atas dilakukannya reklamasi itu sendiri.

Media, terutama media daring yang mampu memberikan *trending topics* bagi pemberitaan secara masif seharusnya mampu memetakan ancaman dengan berbagai fakta yang sesungguhnya. Fakta yang tidak hanya didapatkan, namun fakta dan data yang terverifikasi dari kajian akademisi yang kredibel maupun kajian instansi. Sehingga media secara internal juga mampu untuk mengkonstruksi ancaman kepada pembacanya seperti yang Buzan dan Waever katakan yakni *socially constructed*.

Sifat ancaman yang dapat dibangun dari persepsi sosial tersebut membuat media dengan mudah dapat membantu meningkatkan aspek stabilitas keamanan nasional. Ketika pemetaan ancaman dilakukan oleh media, maka media juga harus memberikan solusi-solusi untuk mengatasi ancaman ataupun potensi ancaman tersebut dengan melakukan *sharing* informasi dengan stakeholder pemerintah terkait.

Dalam kasus reklamasi beberapa ancaman yang dikemukakan media ANTARA News dan *Republika Online* melalui pemberitaan antara lain adalah ancaman lingkungan yang tidak ter-cover secara sempurna, kemudian kedua media daring juga memetakan adanya ancaman korupsi yang telah dibuktikan oleh KPK bahwa dalam reklamasi terdapat adanya tindak pidana korupsi yang menjerat beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dan pengembang, selain itu media juga dengan baik telah memberitakan adanya gesekan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan yang krusial. Walau masih banyak lagi ancaman dan potensi ancaman seperti terpecahnya masyarakat akibat polemik yang dibumbui politisasi isu.

ANTARA News dengan *agenda settingnya* yakni 3E+1N dan selaku media milik pemerintah seharusnya lebih jauh lagi mengkaji aspek keamanan nasional, mengingat keamanan nasional saat ini bisa muncul dari berbagai dimensi, bahkan hampir setiap lembaga memiliki definisi ancamannya sendiri, sehingga perlu ada tindakan lebih untuk memasukkan keamanan nasional melalui *agenda setting*, agar pembaca memiliki gambaran atas ancaman nyata apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Sementara *Republika*

Online walau mengatakan informasi merupakan ancaman utama, namun ancaman-ancaman dalam pemberitaannya lebih bersifat manusia (*anthropocentric*) seperti sosial dan ekonomi, justru tentang lingkungan masih sangat minim dan belum ditonjolkan, padahal ancaman terhadap lingkungan merupakan hal penting yang harus disorot dengan adanya reklamasi.

Kesimpulannya adalah media massa utamanya dalam penelitian ini adalah media daring seharusnya mampu membantu pemerintah untuk mengkonstruksikan ancaman yang lebih nyata ada di lapangan yang mayoritas adalah ancaman non militer seperti ancaman informasi, ancaman lingkungan, ancaman sosial yang dapat memecah belah bangsa dan juga ancaman birokrasi seperti yang terlihat di kasus reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017. Selain itu, media massa harus mampu menjadi *watchdog* guna membangun keholistikan persepsi, yakni tidak hanya membantu pemerintah terkait mempersepsikan ancaman, namun juga menjadi pengawas atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi ataupun mencegah ancaman. Hal tersebut harus dimasukkan kedalam *agenda setting* setiap

media strategis di Indonesia agar *editorial policy* yang akan dibentuk dikemudian hari dapat memberikan arahan untuk melindungi keamanan nasional melalui pemberitaan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Marx bahwa Hegel memang hanya merumuskan pemikiran dan pemikiran tersebut seharusnya dituang kedalam kenyataan yakni beralih dari teori menjadi praktis.<sup>19</sup> Begitupula dalam membahas keterkaitan pemberitaan reklamasi dengan keamanan nasional. Diawali dari pernyataan narasumber kemudian dapat menjadi referensi atas rumusan kebijakan yang tepat seperti dalam contoh kasus pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta di bulan Oktober 2017.

Narasumber pendukung reklamasi memiliki argumennya dan fakta data pendukungnya yang menyatakan 'Reklamasi itu Positif', sebaliknya narasumber yang menolak reklamasi memiliki argumen yang kontra terhadap reklamasi juga dengan fakta dan data pendukungnya menyatakan 'Reklamasi itu Negatif'. Argumen pertama yakni 'Reklamasi itu Positif' yang didasari dari

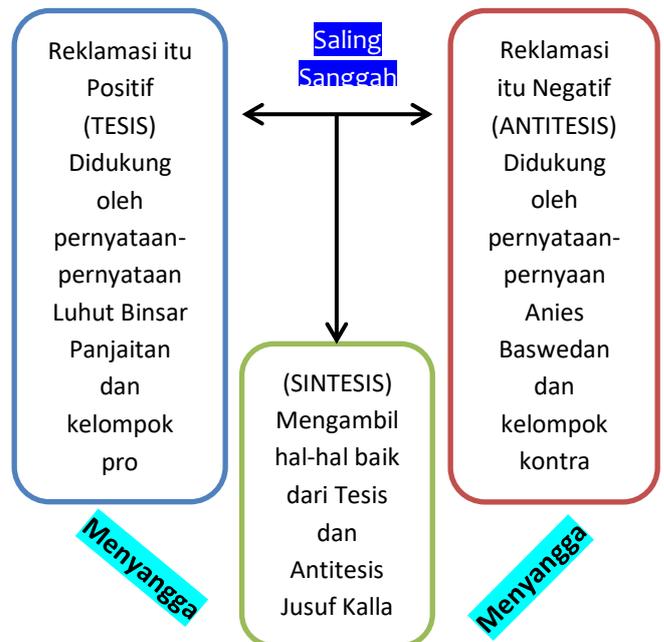
---

<sup>19</sup> Franz Magnis-Suseno, 1999, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia hlm. 48.

awal tercetusnya ide reklamasi merupakan sebuah tesis. Sementara argumen ‘Reklamasi itu Negatif’ merupakan bentuk antitesis terhadap tesis awal yakni ‘Reklamasi itu Positif’. Argumen-argumen tersebut tidak hanya sebatas argumen, melainkan terbentuk karena masing-masing narasumber dalam pemberitaan memiliki kajian masing-masing dan fokus masing-masing dalam memandang reklamasi Teluk Jakarta.

Tesis dan antitesis yang saling menyanggah tersebut menjadi polemik selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya di setiap media massa termasuk media daring berskala nasional utamanya pada tahun 2017. Di Provinsi DKI Jakarta, bahkan ber-resonansi secara nasional, hubungan dari tesis dan antitesis tersebut dibumbui dengan momentum politik, maka perdebatan akan semakin tinggi. Tesis dan antitesis mengenai gagasan reklamasi tersebut sebenarnya telah menemukan titik terang pada bulan Oktober 2017. Hal tersebut dikarenakan ada narasumber yang merumuskan suatu gagasan sebagai sintesis dari proses saling sanggah tesis dan antitesis reklamasi.

**Bagan 6.** Dialektika Hegel dalam Pemberitaan Reklamasi



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Dapat dilihat bahwa gagasan yang bersifat sintesis menyangga tesis dan antitesis. Kelompok pendukung tesis menginginkan reklamasi dibangun dan diselesaikan. Sementara kelompok pendukung antitesis menginginkan reklamasi tidak dilakukan. Namun berdasar pemberitaan maka jelas terlihat bahwa beberapa pulau sudah dibangun yakni Pulau C, Pulau D, Pulau G dan Pulau N. Terdapat 4 (empat) dari 17 (tujuh belas) pulau sudah dibangun, sementara pulau lainnya belum ada secara fisik.

Pernyataan Jusuf Kalla menjadi sintesis atas tesis yang dikemukakan Luhut Binsar Panjaitan dan antitesis yang dikemukakan Anies Baswedan. Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah tidak

melanjutkan pembangunan reklamasi, namun pulau-pulau yang sudah ada (yakni Pulau C, D, G, dan N) tidak mungkin dibongkar karena biaya pembongkarannya memakan cost yang cukup tinggi sehingga lebih baik dipergunakan untuk masyarakat dan pemerintah agar pulau tersebut berfungsi dan terpelihara. Pernyataan Jusuf Kalla telah ada dan dimuat sejak 31 Oktober 2017. Namun kebijakan yang serupa dengan usulan Jusuf Kalla baru diimplementasikan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pada 26 September 2018<sup>20</sup> yakni lebih dari 10 bulan dari keluarnya pernyataan Jusuf Kalla tersebut. Kendala teknis dan hubungan birokrasi dimungkinkan menjadi terlurnya waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikan sintesis yang ada di tahun 2017.

Media telah mampu memberikan ruang pada argumen-argumen pihak yang berselisih walau belum komprehensif, namun media juga memuat ruang bagi argumen-argumen yang bersifat konstruktif walau belum ada bagian dalam media untuk mengkaji isu melalui pembangunan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah, padahal media

berperan pada penentuan kebijakan pemerintah melalui rapat pimpinannya.

### **Kesimpulan**

*Agenda Setting* ANTARA News dalam memberitakan konflik reklamasi Teluk Jakarta yang harus menyertakan pemberitaan bersifat 3E+1 dalam *editorial policy*-nya dapat dikatakan tepat dalam memberitakan suatu konflik, namun diperlukan adanya sorotan-sorotan yang lebih mendalam terhadap unsur-unsur yang krusial terhadap stabilitas keamanan nasional seperti pemberitaan informasi yang berimbang dengan tidak hanya mengatur kuantitas, tetapi juga menyertakan seluruh komponen dalam konflik. Sementara *agenda setting* *Republika Online* masih menunjukkan sikap menolak reklamasi dengan pemberitaan yang tidak berimbang. Hal tersebut mampu memberikan gambaran pada pembacanya untuk bersikap menolak reklamasi dan mendukung serta mengawal janji kampanye gubernur terpilih yang menolak reklamasi, sehingga membuat *agenda setting* *Republika Online* masih perlu dikaji lebih lanjut agar dapat memasukkan unsur-unsur yang meningkatkan keamanan nasional pada

---

<sup>20</sup> Diolah dari berbagai sumber media yang terbit pada tanggal 26 -27 September 2018.

pemberitaan. Hal-hal yang menyebabkan kurang menyeluruhnya informasi yang diberitakan media antara lain adanya kendala-kendala wartawan di lapangan dikarenakan informasi mengenai suatu konflik memang bersifat sensitif dan sering kali ada pihak-pihak yang tidak terbuka dalam memberikan informasi pada media.

Media daring telah memberikan ruang pada argumen-argumen yang dapat menengahi polemik yang terjadi atau memberikan sintesis bagi dua unsur yang saling sanggah dalam konflik reklamasi Teluk Jakarta. Hal tersebut mampu dikembangkan oleh media yakni dengan menyorot argumen-argumen yang konstruktif baik dari pihak yang mendukung atau menolak reklamasi dan dapat digunakan dalam kasus pemberitaan konflik lainnya. Selain itu pemberitaan masih perlu memperhatikan dan mempertimbangkan untuk melakukan sekuritisasi mengenai apa yang sedang dihadapi bangsa ini dengan melakukan sorotan terhadap unsur-unsur yang mengganggu stabilitas keamanan nasional yang belum begitu terlihat jelas dari pemberitaan kedua media daring dalam reklamasi Teluk Jakarta pada Oktober 2017.

## **Rekomendasi**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep dan teori *Agenda Setting* dengan memasukkan unsur yang belum banyak dibahas dalam media yakni Konsep Keamanan Nasional. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yakni tidak memasukkan unsur kepemilikan modal dikarenakan waktu penelitian yang tidak memadai untuk mencari informasi secara menyeluruh mengenai kepemilikan modal dan pengaruhnya terhadap *agenda setting* kedua media tersebut.

Sinergitas pemikiran antara pemerintah, media dan juga akademisi diperlukan dalam meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Salah satunya unsur yang mampu mempromosikannya adalah Universitas Pertahanan. Sebagai satu-satunya universitas yang fokus terhadap studi pertahanan perlu terus mempromosikan teori dan konsep Keamanan Nasional pada ruang-ruang publik, salah satunya contohnya adalah ranah media sebagai sektor krusial dalam penyebaran informasi bagi masyarakat Indonesia.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan evaluasi terhadap *Agenda Setting* media daring ANTARA News dan *Republika Online* dalam menghadirkan

pemberitaan yang mendukung peningkatan keamanan nasional dengan mempertimbangkan berita dengan mengedepankan unsur *peace journalism* dan *ecocentrism* serta membantu pemerintah mempromosikan keamanan nasional melalui sorotan berita terhadap isu-isu yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Media diharapkan membantu pemerintah menyorot isu yang mengganggu kestabilan keamanan nasional, seperti penyebaran *hoax*, isu lingkungan, serta keamanan informasi. Tetap menjadi *watchdog* dalam kebijakan pemerintah serta kehidupan bermasyarakat. Namun akan lebih baik jika media daring membantu pemerintah dalam merumuskan potensi ancaman dan ancaman nyata serta menjadikan masyarakat sadar akan potensi ancaman. Hal tersebut akan meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Ancaman yang telah dipetakan antara lain hanyalah ancaman lingkungan yang masih simpang siur dan ancaman tindak pidana korupsi. Padahal banyak persepsi ancaman yang dapat dipetakan oleh media melalui reklamasi Teluk Jakarta, seperti Daerah Eksklusif, keterpecahan masyarakat karena *hoax* serta keterpecahan birokrasi karena kepentingan politik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Second Edition, (University of Nebraska, Lincoln: SAGE Publications, 2003).
- Dearing, James W. dan Rogers, Everett M. 1996. *Communication Concepts 6: Agenda-Setting*. California: Sage Publications, Inc.
- Eckersley, Robyn. 1992. *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*. New York: UCL Press.
- Lippmann, Walter. 1998. *Public Opinion* (Cetakan Kedua). New Jersey: The Macmillan Company.
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (terjemahan). Jakarta: UI-Press.
- Williams, Paul D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.

### Jurnal

- Edelman, 2017, *Edelman Trust Barometer: 2017 Executive Summary*.
- Schrape, Jan-Felix. 2016. *Social Media, Mass Media and the 'Public Sphere': Differentiation, Complementarity and Co-existenc*. Stuttgart: University of Stuttgart.

### Website

- Biro Informasi dan Hukum Kemenkomaritim Republik Indonesia, 2016, *Rizal Ramli pastikan Moratorium Reklamasi*, melalui <https://maritim.go.id/rizal-ramli-pastikan-moratorium-proyek-reklamasi/>